

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUMBUHAN BUDI PEKERTI DI SMAN 1 KARANGANYAR

Octanti Mariana, Atik Catur Budiati, Nurhadi

Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta

octantimariana@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to find out the strategy in implementing the policy of character development in SMAN Negeri 1 Karanganyar. Based on the research, it can be concluded that there are 5 strategies that is conducted by the school to implement policy of character building in SMAN 1 Karanganyar. The first , introducing the school environment and doing seminar about character building development while flag ceremonial. The second , making it becomes a habit in teaching and learning in class. The third , making it becomes a habit in non curricula activity. The fourth , there is attitude scoring in learning report. The last, there is a rule and punishment. In the analysis of Emile Durkheim's social fact theory , character building development is a social fact. Developing character building shows the spirit of moral discipline, bonding in social groups and and the authority that manage it.. Those three case is element of moralities from Emil Durkeim social fact

Keywords: *Implementation, Character Building Development, Social fact*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi kebijakan penumbuhan budi pekerti di SMAN Negeri 1 Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada 5 strategi yang dilakukan sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan penumbuhan budi pekerti di SMAN 1 Karanganyar. Pertama melalui sosialisasi kegiatan seremonial yaitu saat upacara bendera, pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah dan seminar penumbuhan budi pekerti. Kedua, pembiasaan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ketiga, pembiasaan dalam kegiatan non kurikuler. Keempat, adanya penilaian sikap dalam laporan pembelajaran. Kelima, adanya peraturan dan sanksi yang mengikat. Dalam analisi teori fakta sosial Emile Durkheim, penumbuhan budi pekerti merupakan sebuah fakta sosial. Dalam penumbuhan budi pekerti menunjukkan semangat disiplin moral, adanya keterikanan terhadap kelompok sosial dan adanya otoritas yang mengaturnya. Ketiga hal tersebut merupakan unsur moralitas dari teori fakta sosial Emile Durkheim.

Kata Kunci : Implementasi, Penumbuhan Budi Pekerti, Fakta Sosial

Pendahuluan

Persoalan pendidikan moral atau budi pekerti sampai saat ini masih menjadi fokus pembicaraan yang menarik untuk selalu dikaji dan dicarikan solusinya. Berbagai permasalahan yang dialami oleh remaja maupun para pemuda Indonesia seperti tindak kekerasan, pornografi, meningkatnya dekadensi moral etika atau sopan santun para pelajar, meningkatnya ketidakjujuran pelajar seperti menyontek, membolos, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru dan terhadap figur-figur yang seharusnya dihormati, timbulnya gelombang perilaku yang merusak diri seperti perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan perilaku bunuh diri. (Kemendikbud, 2015:1)

Berdasarkan penyajian data dan informasi kementerian pemuda dan olahraga tahun 2015; Selama tahun 2015 saja jumlah pelaku tindak kriminal yang dilakukan anak dan remaja yang terjadi di Indonesia sebanyak 3.280 kasus dimana 2.797 kasus dikerjakan oleh remaja laki-laki dan 483 kasus oleh remaja

perempuan. Kejadian ini meningkat sekitar 4,3 persen dari tahun sebelumnya dan kasus kriminalitas pada anak ini selalu meningkat setiap tahunnya. Data yang dikutip dari Solopos edisi 20 Maret 2017 sepanjang tahun 2016, ada 105 anak yang terlibat kasus kekerasan di Surakarta dan sekitarnya. Bukan hanya kasus kriminal maupun kekerasan yang banyak terjadi di kalangan pelajar. Banyak berita yang menayangkan lunturnya nilai sopan santun dan menghormati orang yang lebih dewasa, khususnya guru. Pada hari selasa 11 Oktober 2016 tersebar foto-foto yang menunjukkan tingkah laku anak SMA yang tak sopan terhadap gurunya yang sudah lanjut usia. Siswa yang diketahui bernama Ilham dari SMA Toddopuli 6 ini duduk dengan mengangkat kaki diatas meja gurunya yang bernama Pak Ambo. Selain menaikkan kakinya disamping meja guru, siswa ini juga merokok sambil bergaya disamping gurunya yang tampak miris, sambil membaca buku dan tak bisa berbuat apa-apa. (brilio.net). Bukan hanya itu, berdasarkan berita di kompas.com pada tanggal 2

November 2016 ada kasus murid tonjok bu guru. Kasus ini terjadi saat proses konseling diruang bimbingan konseling SMU Pusaka, Kalimantan.

Dengan berbagai data yang telah disebutkan diatas, menggambarkan bahwa ada yang tidak beres dengan pendidikan di Indonesia. Melihat persoalan yang demikian, banyak orang kemudian berpaling pada pendidikan, dimana pendidikan nasional dianggap telah gagal dalam menyemai moral serta karakter bangsa yang berbudi luhur. Berbagai kasus kekerasan, kriminal, ketidaksopanan pelajar terhadap guru menggambarkan betapa pendidikan budi pekerti di Indonesia belum terimplementasi dengan baik. Padahal jika dilihat dari sejarah penerapan pendidikan budi pekerti, pendidikan budi pekerti sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1947. Melihat pendidikan budi pekerti yang belum terimplementasi dengan baik pada pendidikan di Indonesia, Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi penumbuhan budi pekerti di SMAN 1 Karanganyar. Lebih khusus lagi, peneliti ingin

mengetahui bagaimana strategi sekolah dalam mengimplementasikan penumbuhan budi pekerti di SMAN 1 Karanganyar.

Kajian Pustaka

Pendidikan Budi pekerti

Sehubungan dengan topik pendidikan budi pekerti, ada beberapa definisi mengenai budi pekerti. Budi pekerti mengacu pada pengertian dalam bahasa inggris, yang diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung beberapa pengertian antara lain : adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Namun pengertian budi pekerti secara hakiki adalah perilaku. Sementara itu menurut draft kurikulum berbasis kompetensi 2001, budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, norma budaya dan adat istiadat masyarakat. Nurul (2007: 17). Budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan,

pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik.

Istilah budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010: 170) terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti yang tidak dapat dipisahkan, kedua kata tersebut adalah bagian integral yang saling terkait. Budi berarti panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik buruk. Pekerti berarti perangai, tingkah laku, akhlak. Dengan demikian budi pekerti berarti kesadaran yang ditampilkan oleh seseorang dalam berperilaku.

Konsep Kebijakan Penumbuhan budi Pekerti

Penumbuhan budi pekerti bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat; menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau; menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang

serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan peraturan baru Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tersebut, sekolah diharapkan bisa menjadi “taman” yang didalamnya anak-anak Indonesia akan mendapatkan suasana belajar yang penuh tantangan namun menyenangkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur. Bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2015/2016, kemendikbud mencanangkan gerakan penumbuhan Pendidikan Budi Pekerti melalui serangkaian kegiatan non kurikuler, yaitu rangkaian kegiatan harian dan periodik wajib maupun pilihan, seperti yang tertuang dalam Permendikbud tentang Penumbuhan Pendidikan Budi Pekerti untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai dan karakter positif yang telah dijelaskan diatas.

Kompeten, anti-kekerasan, dan berintegritas merupakan bagian dari budi pekerti. Namun, seorang siswa tidak mungkin bisa berbudi pekerti dalam waktu sekejap. Ini langkah panjang dan perlu pembiasaan. Maka dari itu, dalam Permendikbud No.23 Tahun 2015

tentang Penumbuhan Budi Pekerti disebutkan alur pembudayaan agar siswa dapat berbudi pekerti luhur. Alur itu adalah diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan pada akhirnya menjadi budaya. Alur pembudayaan tersebut dapat dilihat dari contoh berikut. Misalkan dalam pembudayaan hidup bersih alurnya adalah sebagai berikut : diajarkan cara hidup bersih dan bahaya hidup kotor. Alur selanjutnya adalah dibiasakan membersihkan yang kotor dan membuang sampah pada tempatnya. Ketika sudah menjadi kebiasaan (tanpa disadari) membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya.. pada tahap dilatih konsisten maka siswa diarahkan bila tidak dikerjakan dan ditegur bila melanggar. Pada tahap sudah menjadi karakter maka siswa akan suka dengan kebersihan dan merasa tidak nyaman apabila melihat sampah tidak pada tempatnya. Dan ketika hidup bersih tersebut sudah menjadi budaya maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang berbudaya hidup bersih. (kemendikbud: 2015: 15)

Teori Fakta Sosial Menurut Emile Durkheim

Dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, Durkheim menyatakan hubungan antara Fungsi Pendidikan kaitannya dengan Moralitas : pendidikan adalah suatu sarana sosial untuk membentuk moral masyarakat. Sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dan khusus untuk menciptakan makhluk baru yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Individualisme harus dibatasi karena individualisme yang berlebihan dalam pendidikan dapat mengakibatkan kegagalan pribadi dan kekacauan sosial. Pendidikan moral merupakan penangkal terhadap penyakit-penyakit seperti itu.” (Durkheim, 1990: xiii)

Moralitas atau etika bagi Durkheim tidak bisa dianggap hanya menyangkut suatu ajaran normatif tentang baik dan buruk, melainkan suatu “sistem fakta yang diwujudkan, (yang) terkait dalam keseluruhan sistem dunia” moralitas bukan saja menyangkut sistem perilaku yang “sewajarnya” melainkan juga suatu

sistem yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan. Dan ketentuan ini adalah “sesuatu yang berada di luar diri” si pelaku. Karena itu disamping mempunyai corak positivistic, studi tentang moralitas semestinya juga bersifat rasionalistis dan sekuler. (Abdullah dan Leeden, 1986:9)

Moralitas adalah pantulan dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bukan saja merupakan suasana yang melahirkan moralitas, melainkan juga tujuan dari tindakan moral itu. Oleh sebab itulah dalam proses perubahan sosial makin diperlukan adanya pendidikan moral. Pendidikan bukan saja berarti mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak, melainkan juga alat untuk menjinakkan hasrat dan dorongan pribadi atau dengan kata lain, alat untuk mendapatkan tumpuan penguasaan diri. Tetapi lebih dari itu, kata Durkheim, tujuan utama pendidikan moral adalah “untuk melekatkan pada anak-anak perasaan akan harkat manusia.” (Abdullah dan Leeden, 1986:16)

Menurut sosiologi moral, Durkheim bertumpu pada tiga sikap

dasar. Pertama, moralitas haruslah dilihat sebagai suatu “fakta sosial” yang kehadirannya terlepas dari keinginan subyektif. Fakta sosial harus dianggap sebagai fenomena sosial, yang terdiri atas aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam bertindak yang bisa dikenal dengan ciri khas tertentu. karena itu “mestilah mungkin untuk melukiskannya, mengklasifikasikannya, dan untuk mencari hukum yang bisa menerangkannya”. Kedua, ia merupakan bagian yang fungsional dari masyarakat. “berbuat moralistis berarti berbuat menurut kepentingan kolektif,” katanya. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa dalil teoritis dari Durkheim adalah bahwa setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai moralitasnya sendiri. Dan ketiga, moralitas terlibat pula dalam proses historis yang bersifat evolusionistis, berubah sesuai dengan struktur sosial. (Abdullah dan Leeden, 1986:11)

Moralitas dapat dipandang sebagai fakta sosial, karena memiliki karakteristik eksternal, umum dan memaksa. Moralitas merupakan relata yang berada diluar individu.

Moralitas hadir dalam kesadaran individu karena dipelajari melalui proses sosialisasi. Oleh sebab itu ia ada sebelum individu ada dan akan tetap ada jika individu ini telah tiada karena ia selalu di transmisikan dari satu generasi ke generasi seterusnya melalui sosialisasi dalam masyarakat. Proses transmisi ini atau dikenal dengan sosialisasi, menyebabkan moralitas ini hadir dalam kesadaran semua masyarakat, tidak bersifat individual. Selanjutnya moralitas memiliki sifat memaksa, dimana semua anggota masyarakatnya mengindahkan keberadaan fakta moralitas ini. Jika tidak, akan ada sesuatu yang memaksa seseorang untuk berperilaku, bertindak dan merasa seperti yang dikehendaki oleh fakta moralitas, jika diberlakukan dalam penelitian ini kebijakan penumbuhan budi pekerti merupakan sebuah moralitas.

Metode Penelitian

Tempat yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yaitu di SMAN 1 Karangayar. SMAN 1 Karangayar dipilih sebagai tempat pelaksanaan penelitian, karena

sekolah ini adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan kebijakan penumbuhan budi pekerti. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, dipilih dengan pertimbangan penelitian memuat deskripsi dan penafsiran data yang berupa ucapan (komunikasi verbal. Data yang digunakan adalah data primer yang berbentuk verbal (ucapan atau kata-kata) serta data sekunder yang berbentuk tindakan serta dokumen. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara. Sumber data primer dicari melalui wawancara tak terstruktur. Sedangkan data sekunder dicari menggunakan observasi dan dokumen. Wawancara diupayakan menggali informasi dan perspektif berpikir informan. Sedangkan observasi dan studi dokumen diupayakan untuk memperoleh data pendukung pelaksanaan penumbuhan budi pekerti. Teknik pengambilan subyek penelitian menggunakan Purposive sampling. Teknik purposive yaitu pengambilan sampel pada pertimbangan dan

tujuan tertentu yang dilakukan dengan sengaja. Adapun pihak yang diwawancarai untuk data yang berkaitan dengan penumbuhan budi pekerti ini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, pembina osis dan siswa kelas X dan XI. Trianggulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu trianggulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data secara eksplanatif. Miles & Huberman (Gunawan 2015 :210- 211) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (data reduction); (2) paparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (verifying).

Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 strategi dalam implementasi penumbuhan budi pekerti di SMAN 1 Karanganyar :

1. Sosialisasi melalui kegiatan seremonial

Sosialisasi penumbuhan budi pekerti dalam kegiatan seremonial ini dilakukan dalam berbagai kegiatan yaitu saat penyampaian amanat pembina upacara setiap hari senin, melalui kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), dan kegiatan seminar khusus tentang penumbuhan budi pekerti. Kegiatan seremonial ini efektif sebagai sarana sosialisasi karena kegiatan-kegiatan diikuti oleh hampir seluruh warga sekolah sehingga informasi mengenai kebijakan penumbuhan budi pekerti dapat tersampaikan dengan baik.

2. Pembiasaan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas

Bentuk pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar adalah masuk kedalam kelas tepat waktu, bersalaman kepada guru sebelum memasuki kelas, berdoa bersama dengan dipimpin oleh salah satu siswa secara bergantian, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, melakukan literasi dan diakhir pembelajaran diakhiri dengan menyanyikan lagu daerah dan juga doa bersama.

3. Kegiatan Non Kurikuler

Pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan nonkurikuler dilakukan melalui kegiatan lomba penumbuhan budi pekerti dan juga kegiatan *clasmeeting*. Kegiatan lomba penumbuhan budi pekerti ini dilakukan untuk menilai pencapaian kebijakan penumbuhan budi pekerti yang telah dilakukan selama satu semester.

4. Penilaian sikap dalam laporan pembelajaran

Penilaian sikap menjadi salah satu tolak ukur prestasi di SMAN 1 Karanganyar sehingga sikap siswa menjadi aspek penting yang harus dinilai. Dimasukkannya nilai sikap dalam laporan hasil pembelajaran siswa dapat memotivasi siswa untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan berbagai pembiasaan dalam penumbuhan budi pekerti.

5. Adanya peraturan dan sanksi yang mengikat

Adanya peraturan dan sanksi yang mengikat dapat dilihat melalui adanya tata tertib yang mengatur mengenai diselenggarakannya penumbuhan budi pekerti di SMAN 1 Karanganyar.

Pembahasan

Penumbuhan budi pekerti dapat dianalisis dengan teori fakta sosial karena dalam penumbuhan budi pekerti menunjukkan adanya sebuah semangat disiplin moral, menunjukkan adanya keterikatan terhadap kelompok sosial begitu juga menunjukkan bahwa adanya otoritas yang mengaturnya. Penjelasan dari 3 hal tersebut akan dijelaskan berikut ini :

1. Penumbuhan Budi pekerti menunjukkan adanya semangat disiplin moral

Moralitas terdiri dari suatu sistem kaidah atau norma mengenai tindakan yang menentukan tingkah laku kita. Kaidah tersebut menentukan bagaimana kita harus bertindak pada situasi-situasi tertentu. Bertindak secara tepat tidak lain adalah taat secara tepat terhadap kaidah yang ditetapkan. Semangat disiplin moral mengajarkan kita untuk tidak bertindak sesuai dengan keinginan-keinginan sesaat kita sebagai makhluk individu. Dalam hal ini disiplin moral mengajarkan kita bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindakan yang

bermoral atau tindakan yang benar bila kita mengendalikan keinginan-keinginan tertentu, melunakkan hasrat-hasrat tertentu dari dalam diri individu. Disiplin moral ini berkaitan juga dengan keteraturan perilaku pada saat-saat tertentu. Sehingga disiplin moral juga berarti bagaimana manusia berperilaku secara teratur dan tetap sesuai nilai norma yang ada (Durkheim, 1990: 18).

Semangat disiplin dalam penumbuhan budi pekerti dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seluruh warga sekolah SMAN 1 Karanganyar yang mengatur dan membatasi perilaku masyarakat SMAN 1 Karanganyar. Kebijakan penumbuhan budi pekerti ini bersifat membatasi keinginan-keinginan individu di sekolah untuk berbuat sesukanya. Ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Dan terlebih dari itu, taat terhadap akidah-kaidah atau peraturan yang ada tersebut tidak hanya dilakukan dalam sekali waktu, namun perlu untuk dilakukan secara teratur dan kontinyu. Peraturan tersebut berupa tata tertib tertulis maupun tidak tertulis. Setiap

peraturan tersebut membatasi hasrat atau keinginan tiap-tiap individu, mereka semua diatur dan harus tunduk dengan segala peraturan yang ada. Dalam penumbuhan budi pekerti bentuk peraturannya tidak semua tercantum dalam tata tertib tertulis namun peraturannya berbentuk berbagai kegiatan yang dibiasakan untuk dikerjakan oleh sekolah. Dalam kebijakan tersebut setiap individu harus mampu menekan hasrat pribadinya untuk datang ke sekolah tidak setiap saat karena berdasarkan kebijakan penumbuhan budi pekerti, SMAN 1 Karanganyar membuat kebijakan untuk menerapkan jam masuk sekolah pukul 06.45 dan semua warga sekolah harus membiasakan diri untuk tidak datang terlambat.

2. Adanya keterikatan kelompok sosial dalam penumbuhan budi pekerti

Tindakan moral berarti mengejar tujuan impersonal. Jika seseorang ingin menjadi makhluk moral, manusia harus mengabdikan dirinya kepada sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Ia harus menyatu dengan masyarakat, betapapun

rendahnya tingkat persatuan tersebut. Itulah sebabnya mengapa tugas pertama pendidikan moral adalah menyatukan anak dengan masyarakat yang paling dekat dengannya yaitu keluarga. Dalam penumbuhan budi pekerti, setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat SMAN 1 Karanganyar memiliki konsekuensi untuk mentaati berbagai peraturan, nilai dan norma yang telah ada. Begitu juga harus mau untuk melaksanakan semua peraturan dalam pembiasaan penumbuhan budi pekerti ini. Setiap individu yang menjadi anggota masyarakat SMAN 1 Karanganyar ini memiliki konsekuensi untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan serta nilai norma yang dipegang bersama. Perilaku, perkataan dan perasaan dari seluruh individu diatur oleh kepentingan bersama. Jika ingin diterima di dalam kelompok masyarakat SMAN 1 Karanganyar, setiap individu harus berperilaku sesuai keinginan masyarakat hal itu menunjukkan bahwa individu tersebut adalah makhluk bermoral di kelompok tersebut. Misalnya bagi siswa yang tidak terbiasa atau dibiasakan untuk

memberi senyum, salam, sapa dan mencium tangan orang yang lebih dewasa dirumah, siswa tersebut harus dengan rela melakukan itu disekolah karena berdasarkan peraturan yang ada, kebiasaan senyum, salam, dan sapa bahkan bersalaman dan mencium tangan guru adalah suatu keharusan dengan alasan untuk menumbuhkan sikap sopan-santun siswa. Kesadaran siswa akan dilatih karena hal itu dianggap baik oleh warga sekolah, jadi mau tidak mau harus dikerjakan. Jika ada siswa yang tidak mengerjakan hal tersebut, maka dia akan di cap sebagai orang yang tidak sopan, judes dan lainnya. Misalkan lagi, ada banyak siswa yang masih sering terlambat datang ke sekolah karena jam masuk sekolah yang lebih pagi dari sekolah yang lain. Jika siswa tersebut ingin memenuhi keinginan atau hasrat pribadinya untk bangun siang dan berangkat ke sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, siswa tersebut akan dianggap sebagai siswa yang bermasalah karena dia tidak bisa melakukan atau mematuhi peraturan seperti yang individu

lainnya lakukan, yaitu datang tepat waktu ke sekolah.

3. Adanya otoritas dalam kebijakan penumbuhan budi pekerti

Otoritas adalah pengaruh yang memaksakan kepada kita semua kekuatan moral yang kita akui sebagai sesuatu yang berada diatas kita. Karena pengaruh itulah kita bertindak menurut cara yang sudah ditetapkan, dan bukan tindakan karena tindakan yang diharuskan itu menarik bagi kita. Juga bukan karena adanya kecenderungan batin tertentu, entah pembawaan atau kebiasaan, melainkan karena dalam otoritas itu ada suatu pengaruh yang bersifat memaksa, yang menyuruh kita bertindak demikian. Ketaatan berarti menerima otoritas tersebut (Durkheim, 1990:21). Berkat otoritas yang ada, kaidah-kaidah moral menjadi kekuatan asli yang mencegah keinginan dan hasrat individu. Kekuatan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat material namun menggerakkan jiwa. Dalam kekuatan tersebut terkandung semua yang diperlukan untuk membelokkan kehendak, memaksanya dan mengarahkannya ke tujuan

tertentu(Abdullah dan Leeden, 1986:219)

Pemegang otoritas moral dalam penumbuhan budi pekerti ini bersifat sosial, artinya tidak hanya satu individu yang mempunyai otoritas untuk menjaga moral warga sekolah SMAN 1 Karanganyar. Seperti yang didapat melalui wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa dalam penumbuhan budi pekerti ini kepala sekolah misalnya sering mengontrol dilaksanakannya kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di dalam kelas, setiap pagi kepala sekolah berkeliling sekolah untuk memastikan bahwa kegiatan pembiasaan di awal jam pelajaran dilaksanaka oleh setiap kelas. Selain itu guru memiliki peran untuk menjadi pembimbing dalam menyelenggarakan pembiasaan didalam kelas seperti kegiatan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, literasi dan lainnya. Kegiatan pembiasaan di dalam kelas, menjadi tanggung jawab guru untuk mendampingi dan membimbing. Guru BK juga menjadi salah satu pihak yang berotoritas dalam

penumbuhan budi pekerti ini. Dalam hal ini guru BK memiliki otoritas untuk mengembalikan peserta didik yang melakukan pelanggaran untuk kembali menjadi anak yang patuh dengan cara memberikan skorsing dan pendampingan agar anak yang melakukan pelanggaran tidak terlalu lama bertindak jauh dari peraturan yang ada.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan bahwa ada 5 strategi dalam implementasi penumbuhan budi pekerti di SMAN 1 Karanganyar : *Pertama*, sosialisasi melalui kegiatan seremonial. Sosialisasi penumbuhan budi pekerti dalam kegiatan seremonial ini dilakukan dalam berbagai kegiatan yaitu saat penyampaian amanat pembina upacara setiap hari senin, melalui kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), dan kegiatan seminar khusus tentang penumbuhan budi pekerti. Kegiatan seremonial ini efektif sebagai sarana sosialisasi karena kegiatan-kegiatan diikuti oleh hampir seluruh warga sekolah sehingga informasi

mengenai kebijakan penumbuhan budi pekerti dapat tersampaikan dengan baik. *Kedua*, Pembiasaan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Bentuk pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar adalah masuk kedalam kelas tepat waktu, bersalaman kepada guru sebelum memasuki kelas, berdoa bersama dengan dipimpin oleh salah satu siswa secara bergantian, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, melakukan literasi dan diakhir pembelajaran diakhiri dengan menyanyikan lagu daerah dan juga doa bersama. *Ketiga*, Pembiasaan dalam kegiatan Kegiatan Non Kurikuler. Pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan nonkurikuler dilakukan melalui kegiatan lomba penumbuhan budi pekerti dan juga kegiatan *clasmeeting*. Kegiatan lomba penumbuhan budi pekerti ini dilakukan untuk menilai pencapaian kebijakan penumbuhan budi pekerti yang telah dilakukan selama satu semester. *Keempat*, Penilaian sikap dalam laporan pembelajaran. Penilaian sikap menjadi salah satu

tolak ukur prestasi di SMAN 1 Karanganyar sehingga sikap siswa menjadi aspek penting yang harus dinilai. Dimasukkannya nilai sikap dalam laporan hasil pembelajaran siswa dapat memotivasi siswa untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan berbagai pembiasaan dalam penumbuhan budi pekerti. *Kelima*, Adanya peraturan dan sanksi yang mengikat. Adanya peraturan dan sanksi yang mengikat dapat dilihat melalui adanya tata tertib yang mengatur mengenai diselenggarakannya penumbuhan budi pekerti di SMAN 1 Karanganyar.

Berdasarkan teori fakta sosial, strategi dalam implementasi penumbuhan budi pekerti ini merupakan sebuah semangat disiplin moral. Hal ini karena dalam implementasi penumbuhan budi pekerti ini warga sekolah SMAN 1 Karanganyar harus mengerjakan setiap kegiatan pembiasaan ini secara teratur dan kontinyu agar penumbuhan budi pekerti menjadi sebuah budaya, terlebih dari itu setiap pembiasaan tersebut menjadi sarana pembentukan karakter yang berbudi pekerti luhur karena setiap

hari dikerjakan secara kontinyu. Penumbuhan budi pekerti ini juga berlaku bagi seluruh warga SMAN 1 Karanganyar sehingga dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga sekolah. Setiap individu harus rela mengerjakan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan tersebut jika individu tersebut ingin tetap dianggap sebagai warga SMAN 1 Karanganyar. Walaupun pada dasarnya tidak semua kegiatan tersebut berkenan untuk dikerjakan secara pribadi. Sosialisai, pembiasaan, sanksi yang ada berlaku bagi keseluruhan warga sekolah. Untuk menjaga agar penumbuhan budi pekerti ini dipatuhi oleh seluruh warga sekolah maka kepala sekolah, guru maupun guru BK memiliki peran untuk mengatur dan menjaga peraturan tersebut tetap ada dan dipatuhi sehingga tujuan yang ingin dicapai dari diterapkannya penumbuhan budi pekerti ini pun juga dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik & Van Der Leeden A.C (Eds). (1986). *Durkheim dan*

Pengantar Sosiologi Moralitas.

Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Ali, Muhtadi. (2015). *Strategi Untuk Mengimplementasikan Pendidikan Budi Pekerti Secara Efektif di Sekolah*. LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

Durkheim, Emile. (1990.). *Pendidikan Moral Suatu studi teori dan Aplikasi Sosisologi Pendidikan*. Jakarta : Erlangga

Gunawan, Imam. (2015). *Metode penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Bandung : Bumi Aksara

Hartono, Rudi. (2017, 19 Maret). Menolak Diajak Mabuk pelajar Dianiaya Kenalan, *Solopos*, halaman 4

Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Hidayat, Rakhmat. (2014). *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Ismail, Muhammad. (2017, 21 Maret). Teror 13 Tahun Predator Anak, *Jawa Pos*, halaman 1

Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial dari teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Mulyasa. (2013). *Pengembangan dan Implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prakoso, Taufik. (2017, 20 Maret). 2016, 105 Anak terlibat Kasus kekerasan, *Solopos*, halaman 7

Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sunartono. (2017, 15 Maret). Polisi Tangkap 2 Pelaku klithih, *Solopos*, halaman 3

Sutjipto. (2014). *Pendidikan Budi Pekerti Pada Kurikulum di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Kemendikbud

Zuriah, Nurul. (2007). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan menggagas platform pendidikan budi pekerti secara kontekstual dan futuristik*. Jakarta : Bumi Aksara